



Haikal Dahiba<sup>1</sup>  
 Sukarman Kamuli<sup>2</sup>  
 Saleh Al Hamid<sup>3</sup>

## KONFLIK KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LAHUMBO, KECAMATAN TILAMUTA, KABUPATEN BOALEMO

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang sudah tidak berjalan lagi atau fakum dan untuk mengetahui Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan sumber data pemerintah desa, pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Lahumbo. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pada penelitian yang telah dilakukan peneliti berperan sebagai pewawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo dengan indikator (1) Konflik Individu, memiliki pertentangan wewenang dengan pengurus lain mulai dari pengelolaan hingga dengan transparansi anggaran yang keluar dan masuk yang tidak jelas. (2) Konflik Struktural dilihat dari fungsional dari masing- masing pengurus sudah tidak sesuai lagi, dilihat karena minimnya komunikasi antar sesama pengurus dengan ketua BUMDes sehingga terjadilah kinerja yang tidak maksimal. (3) Konflik Massa yang terjadi dalam kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lahumbo yakni minimnya komunikasi antara pengurus dan masyarakat, kemudian kesepakatan atau komitmen tidak dijalankan dan tindakan dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat terkait dan BUMDes kini tidak terselesaikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Konflik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (1) Faktor Internal yakni, dilihat dari Sumber Daya Manusia yang masih minim dengan pengetahuan dalam memenej hasil usaha BUMDes. (2) Faktor Eksternal yakni, Pertama, masyarakat yang kurang terlibat dalam sosialisasi terkait pembahasan program yang dijalankan. Kedua, pengembalian modal kembali tidak terlaksanakan dengan baik. ketiga, kegagalan pengurus dalam mengembalikan hasil pertanian dalam bentuk finansial.

**Kata Kunci:** Konflik Kelembagaan, BUMDes, Desa Lahumbo

### Abstract

This research aims to determine the extent of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Institutional Conflict in Lahumbo Village, Tilamuta District, Boalemo Regency, which is no longer running or in disrepair and to determine the factors that influence the occurrence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Institutional Conflict in the Village. Lahumbo, Tilamuta District, Boalemo Regency. This research uses qualitative research methods, the research location is Lahumbo Village, Tilamuta District, Boalemo Regency with data sources from the village government, BUMDes administrators and the Lahumbo Village Community. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation methods. In the research that has been conducted, researchers act as interviewers with the aim of obtaining information from data sources. The results of the research show that there is institutional conflict in Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Lahumbo Village with indicators (1) Individual Conflict, having conflicts of authority with other administrators starting from

<sup>1,2,3</sup> Prodi PPKn, Universitas Negeri Gorontalo  
 email: haikaldahiba499@gmail.com<sup>1</sup>, sukarman\_kamuli@ung.ac.id<sup>2</sup>, salehalhamid@ung.ac.id<sup>3</sup>

management to unclear transparency of incoming and outgoing budgets. (2) Structural conflict seen from the functional aspects of each administrator is no longer appropriate, seen because of the lack of communication between fellow administrators and the head of BUMDes, resulting in suboptimal performance. (3) Mass conflict that occurs within the Lahumbo Village-Owned Enterprise (BUMDes) institution, namely the lack of communication between administrators and the community, then agreements or commitments are not implemented and actions in resolving conflicts with the relevant community and BUMDes are now unresolved. The factors that influence Village-Owned Enterprise (BUMDes) Conflict are (1) Internal factors, namely, seen from Human Resources which still lack knowledge in managing BUMDes business results. (2) External factors, namely, First, the community is less involved in socialization related to discussing the program being implemented. Second, the return of capital was not carried out properly. Third, the management's failure to return agricultural products in financial form.

**Keywords:** Institutional Conflict, BUMDes, Lahumbo Village

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Dalam Undang-undang Republik Menunjukkan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat 1 “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul (hak tradisional) yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Menunjukkan. Salah satu penyelenggara kecil Negara adalah Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah perangkat Desa yang menyelenggarakan pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Dengan adanya pemerintahan desa semua wilayah dapat dikontrol dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa adalah menyeragamkan kelembagaan desa. Dengan adanya pemerintah desa maka dapat melaksanakan dan menjalankan pembangunan yang ada di desa itu sendiri.

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Menurut Sa'dullah 2016 dalam tulisannya (R, Al-Fath, & Wijaya, 2022) Desa dinilai memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Menunjukkan cenderung bermukim di wilayah pedesaan, sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Dilihat dari segi pembangunan yang ada di desa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota, apalagi dilihat dari segi kesejahteraan, ekonomi maupun fasilitas. Dalam pembangunan yang ada di desa yang dilakukan oleh pemerintah masih belum signifikan dalam mendorong perkembangan pembangunan desa.

Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah. Sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa. (Budiono, 2015) Menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa.

Salah satu cara Pemerintah Desa dalam mensejahterakan dan mengembangkan perekonomian desa dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Maryuni 2008) bahwa “BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi

desa". Pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sangat memiliki lembaga yang produktif agar bisa mengelola usaha-usaha yang dibangun. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan Desa.

Pada kelembagaan ini dijelaskan bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat baik formal maupun nonformal ini memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya kerjasama dari lembaga BUMDes dan masyarakat maka usaha-usaha yang dijalankan akan berjalan dengan lancar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Menunjukkan et al., 2018) bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa memiliki sumber daya yang tersedia, partisipasi, pemberdayaan manusia, dukungan pemerintah, serta kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan adanya dukungan serta kerja sama, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan lebih efektif dalam meningkatkan usaha-usaha yang akan dijalankan.

Berdasarkan peraturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam Pasal 213 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pada pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bertujuan untuk mengelola Potensi baik pada Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya manusia. Dengan terealisasinya Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka ini menjadi layanan kebutuhan bagi usaha yang produktif yang diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kurang mampu, serta dapat mencegah praktik rentenir dan pelepasan uang. Selain itu tujuan didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mendorong dalam usaha lapangan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Alkadafi, 2014) bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi bagi pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Menurut (Ridwan, 2014) Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu; (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik, (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes, (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama, (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut, (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan dan, (6) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa terlepas dari suatu ikatan organisasi, baik yang bersifat formal maupun informal. Sadar atau tidak sebenarnya sebagian besar waktu kehidupan kita ini telah dihabiskan dalam rangka ambil bagian/ partisipasi dalam kegiatan organisasi tersebut, mulai dari organisasi keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kita bekerja (Zubaidah & S, 2010). Dalam kehidupan berorganisasi tersebut, tidak lepas daripada konflik. Konflik merupakan sebuah wahana dalam mewarnai kehidupan, tanpa adanya konflik kehidupan tak bermakna. Namun disisi, lain konflik merupakan hambatan dalam langkah seseorang menuju kesuksesan, baik itu kesuksesan yang berskala kecil maupun kesuksesan yang berskala besar. Allah menciptakan racun pasti ada penawarnya, begitu juga dengan konflik. Tiap langkah pasti ada konflik, dan tiap konflik pasti ada penyelesaiannya.

Menurut Kilman, Thomas (1978) dan (Wijono, 1993: p.4) menyatakan bahwa konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam, (Wahyudi & A, 2015). Konflik terjadi bukan hanya antar individu ataupun kelompok, bisa saja konflik terjadi dalam sebuah kinerja dalam sebuah organisasi maupun instansi, karena adanya perbedaan persepsi maupun pendapat maka konflik tersebut terjadi, hal ini dapat menghambat atau mengganggu kinerja menjadi tidak produktif. Hal ini juga sering kali terjadi pada lembaga Badan Usaha

Milik Desa yang kian memiliki konflik baik konflik internal maupun eksternal. Dengan demikian maka konflik tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dalam menjalankan sebuah aktifitas baik formal maupun non formal.

Melihat kondisi Badan Usaha Milik Desa yang berada di tiap- tiap desa kini memiliki masalah yang berbeda mulai dari menunjukkan aktifitas pengurus BUMDes, Transparansi anggaran BUMDes, hingga pada Konflik kelembagaan BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes pastilah tidak selalu memberikan harapan yang baik terhadap Potensi yang dimiliki oleh desa yang kemudian dikelola oleh BUMDes sebagai usaha mandiri masyarakat dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri. Salah satunya Badan Usaha Milik Desa yang didirikan di Desa Lahumbo, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lahumbo yang diberi BUMDes 9 Bintang yang rintis pada tahun 2016 kemudian diresmikan pada tahun 2017. Adapun anggaran BUMDes yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebesar Rp.218.000.000. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggerakkan program kerjanya melalui potensi Desa Lahumbo yakni pertanian jagung. Sebagaimana sebagian penduduk Desa Lahumbo memiliki pekerjaan sebagai petani jagung. Maka dengan potensi desa dijadikan sebagai program kerja oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai usaha Desa dalam meningkatkan perekonomian Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerja sama dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk menjalankan usaha milik desa dengan memberikan modal awal yang dapat dimanfaatkan dalam menanam jagung. Dengan adanya program tersebut dapat memudahkan serta memberikan peluang kerja terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Dengan begini petani lebih mudah dalam mengembangkan usaha jagung yang senantiasa mendapat support dengan cara bekerja sama dengan Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo. Namun seiring berjalannya waktu kini lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kecenderungan antara masyarakat karena tidak konsisten dengan pelaksanaan yang dijalankan. Dengan melihat masalah yang dihadapi maka telah menuai konflik antara kelembagaan sehingga terjadi sikap apatis antar sesama pengurus Badan Usaha Milik Desa. Atas hal tersebut maka program yang dijalankan kini sudah tidak efektif lagi. Dengan demikian maka sangat dibutuhkan sikap tegas dari kepala desa untuk dapat meminimalisir konflik tersebut. Olehnya, penelitian ini berfokus untuk mengetahui Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo” serta 2. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo.

## **METODE**

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang yang dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu kajian mendalam pada latar ilmiah atau kondisi dari suatu keutuhan masalah sebagai sumber data, yang dikaji adalah sifat ilmiah atau kondisi dari suatu masalah, maka pendekatan penelitian yang dianggap sesuai digunakan yaitu pendekatan kualitatif, hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif kerap kali disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya sering dilakukan pada situasi yang alamiah natural setting. Dalam (Sugiyono, 2013) Dalam penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah, memiliki arti objek tersebut adalah objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti serta kehadiran peneliti tidak memiliki pengaruh dinamika pada objek yang akan diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Suharsimi, 2005:234) dalam (Fitria & Rona, 2012) “penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.”

Adapun sumber data yang digunakan meliputi, Sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh penelitian sendiri, data tersebut berkaitan dengan objek penelitian oleh sebab itu data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dilapangan yakni Masyarakat, Pengurus BUMDes, dan pemerintah Desa. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber tertulis baik Buku, Jurnal Penelitian, Dokumen-dokumen penting, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian

ini. Untuk teknik pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan Observasi adalah guna memperoleh gambaran umum terhadap lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian, mencari informasi tentang semua aktivitas di lokasi penelitian, agar memperoleh pengalaman mengenai pelaku (informan) yang akan diteliti dengan tempat dimana informan tersebut seringkali beraktivitas, kemudian untuk mengetahui keterbatasan peneliti terhadap sudut pandang informan hal tersebut dilakukan untuk menafsirkan hasil pengamatan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai Konflik Kelembagaan BUMDes di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara sederhana wawancara merupakan suatu kejadian maupun proses interaksi antara peneliti dan informan dan sumber informasi merupakan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2013:72) mendefinisikan Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sementara itu teknik terakhir yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, berupa surat-suratan, catatan-catatan, foto dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Dan Sejarah Desa Lahumbo

Pada Tahun 1820 desa ini masih hutan belukar yang penuh onak dan duri serta dihuni oleh binatang buas seperti anoa dan ular-ular yang berbisa. Pada Tahun 1901 datanglah beberapa orang dari selatan wilayah ini antara lain: Temmy Huluya (Patamani), Temey Hasanah (Habbibulah), Temey Alaiha (Amara) dan beberapa temannya yang semakin tahun bertambah sehingga mereka merombak dan membuka hutan ini untuk dijadikan perladangan yang terhampar berhektar-hektar. Sebelum menjadi sebuah desa, tempat ini menjadi pertemuan atau berkumpulnya para penduduk dipimpin oleh yang tertua/penghulu dari mereka saat mereka merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan setahun sekali, di mana tempat ini diberi julukan “YIBUNGO” yang berarti “ Mata Air Mineral”. Kemudian julukan ini disempurnakan dengan kata atau istilah yang dikenal dengan nama “Mato Lo Lahumbo” dalam arti pusat mata air, maka dengan tentunya air ini pun mengalir menuju arah yang paling rendah sehingga mengelilingi tempat ini dan bermuara di suatu tempat yang dikenal penduduk dengan sungai Tilamuta (Tilamuta).

Dengan kemajuan dan perkembangan zaman maka nama “Mato Lo Lahumbo” mulai sirna dan menghilang di kalangan masyarakat, namun berkat jayanya nama ini muncul kembali pada saat diadakan pemekaran desa Mohungo, dimana pisahan desa Mohungo diberi nama DESA LAHUMBO. Desa Lahumbo sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta, sebelah Timur dengan Desa Pangi Kecamatan Dulupi, dan sebelah Barat dengan Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta. Pada tahun 1988 tepatnya tanggal 1 Menunjukkan 1988 desa ini resmi menjadi desa Definitif sesuai SK Gubernur Sulawesi Utara C.J Rantung Menunjukkan. 36 tahun 1988 dengan nomor 71.01.04.2015 menjadi desa yang berdiri sendiri dan kemudian pada tanggal 18 Juli 1989 diadakan pemilihan kepala desa yang sebelumnya yang dikepalai oleh pelaksana harian yaitu: 1. Hino Manopo : 1986 – 1987 2. Djafar Alamri : 1987 – 1988 3. Daud A. Jadjitala : 1989 – 2008 4. Akri Husain : 2008 – 2013 5. Saipul Kamumu : 2013-2015 6. Rama Bakari : 2016 Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Desa Lahumbo terdiri atas 5 (lima) dusun, maka di bawah ini beberapa uraian terbentuknya dusun-dusun di Desa Lahumbo, sebagai berikut:

*Pertama*, Terbentuknya Dusun I Butio Waktu masyarakat datang di wilayah ini mula-mula mereka menjumpai area rimbunan pohon bulu yang mereka sebut “Temula” yang artinya yang mula mula mereka temui. Kemudian bulu temula itu dipotong beruas-ruas, selanjutnya dibuat alat musik semacam kecapi yang bagian belakangnya dilubangi sedang bagian depannya dibuatkan tali kecapi dari bulu itu sendiri dan cara memainkannya digesek, sehingga menimbulkan irama yang terdengar menunjukkan dan alat musik ini dinamai “Butio” sehingga

menjadi nama dusun I. *Kedua*, Terbentuknya Dusun II Botu Tomi'e Di tempat ini banyak batu-batuan yang bertingkat-tingkat dari mana airnya mengalir dari atas ke tingkat yang rendah dengan bunyi yang gemericik, sedang di sela-sela bebatuan tersebut terdapat lubang-lubang tempat persembunyiannya berbagai macam udang dan belut. Maka batu seperti ini yang menurut paham masyarakat dulu adalah "Botutomi'e" sehingga menjadi nama dusun II.

*Ketiga*, Terbentuknya Dusun III Mangulipa Menurut sejarah pada saat itu di tempat ini terdapat banyak tumbuhan sebangsa bulu air (Wawohu) yang bentuknya sama dengan wawohu namun besarnya tidak sama, dia lebih kecil dibanding wawohu, sayangnya tumbuhan tersebut telah musnah yang ada tinggal namanya yaitu Tumbuhan "Manggulipa" sehingga menjadi nama dusun III. *Keempat*, Terbentuknya Dusun IV Bualo Di tempat ini terdapat pohon yang tingginya sekitar 3 M daunnya lebar tampak bundar dan buahnya berbentuk semacam kue, biasanya pohon-pohon ini tumbuh di pinggir sungai sehingga masyarakat dulu waktu mereka membuka lahan baru di tempat ini dan hendak menyeberangi sungai kelihatan oleh mereka pohon ini tumbuh dengan subur, oleh penduduk pada waktu itu pohon ini diberi nama "Bualo", sehingga menjadi nama dusun IV. *Kelima*, Terbentuknya Dusun V Danta Sebagian besar masyarakat Dusun IV Bualo adalah petani dan telah menetap di lahan pertanian mereka, mengingat semakin jauhnya pelayanan pemerintahan Dusun IV Bualo terhadap masyarakat yang tinggal di tempat areal pertanian tersebut, maka Pemerintah Desa Lahumbo melakukan pemekaran Dusun IV Bualo di mana pisahan dusun IV Bualo diberi nama Dusun V Danta. Kata Danta diambil dari kebiasaan masyarakat sekitar areal lahan pertanian tersebut ketika usai panen ada beberapa masyarakat yang melakukan pencarian sisa tanaman jagung yang terlewat oleh pemilik lahan setelah dipanen, dan pencarian sisa tanaman jagung itu oleh orang tua dulu diberi istilah "Danta"

### **Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo**

Dalam indikator ini, akan diuraikan hasil pembahasan mengenai temuan penelitian yang berfokus pada (1) Konflik Individu dalam kelembagaan BUMDes Lahumbo; (2) Konflik Struktural dalam kelembagaan BUMDes Lahumbo; (3) Konflik Massa dalam kelembagaan BUMDes Lahumbo yang dianalisis menggunakan teori (Kamuli, S., Latare, S., & Sahi, 2023). Selanjutnya, untuk pendekatan faktor konflik kelembagaan BUMDes menggunakan teori utama yang digunakan adalah teori (Ayyaash, 2019) yang membagi dua faktor yakni secara internal meliputi (1) Faktor internal. Faktor internal berkaitan dengan konflik kelembagaan yang terjadi didalam baik itu antara pengurus dan pemerintah desa dan; (2) Faktor secara internal meliputi faktor terhadap konflik yang terjadi diluar baik.

#### **1. Konflik Individual**

Konflik individu terjadi ketika terdapat pertentangan atau perselisihan antara dua atau lebih individu. Konflik ini dapat timbul karena perbedaan tujuan, nilai, kepentingan, atau pandangan di antara individu-individu tersebut. Contoh konflik individu termasuk perselisihan pribadi, perbedaan pendapat, atau ketidaksepakatan dalam mengambil keputusan. Konflik individu dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, tempat kerja, atau dalam hubungan personal. (Kamuli, Latare, & Sahi, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian diatas peran BUMDes dalam meningkatkan Usaha yang dijalankan di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes yang mengalami pertentangan dengan Ketua BUMDes berupa tidak ada keterbukaan serta transparansi anggaran yang jelas dengan pengurus lain soal pengelolaan usaha-usaha BUMDes, seperti pengelolaan dana, pengeluaran serta pengembalian modal dari usaha tersebut. Hal ini sama didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa masyarakat yang hanya meminjam serta mengembalikan pinjaman dana BUMDes.

Atas temuan itu, dapat dimaknai bahwa Konflik individu dalam kelembagaan Badan Usaha Milik Desa terjadi karena pertentangan penyalahgunaan wewenang oleh ketua BUMDes terhadap pengurus lain dan tidak memiliki komunikasi yang baik terhadap transparansi anggaran dana yang sudah disalurkan terhadap masyarakat. Berdasarkan peran sebagai Ketua BUMDes Desa lahumbo seharusnya mampu menjadi pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dengan pengurus lain dalam pengelolaan usaha yang akan dijalankan. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan pengurus lain, sehingga tidak akan menimbulkan pertentangan

antar pengurus dan masyarakat. Sehingga usaha yang akan dikelola dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Solekhan (2014:73) dalam (Chintary, V. Q., & Lestari, 2016) Memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

## 2. Konflik Struktural

Konflik struktural merujuk pada konflik yang timbul karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakadilan sosial, atau ketidaksetaraan dalam struktur sosial, politik, atau ekonomi. Konflik struktural melibatkan konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, kekuasaan, atau peluang. Contoh konflik struktural termasuk konflik antara kelas sosial, konflik rasial, atau konflik antara kelompok etnis atau agama. (Kamuli, Latare, & Sahi, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian diatas peran struktur BUMDes dalam pengelolaan Usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik. Hal ini sama yang didapatkan oleh peneliti terhadap sekretaris BUMDes yang tidak mengetahui administrasi Pengelolaan BUMDes, artinya sekretaris hanya diberikan nama saja namun tidak memiliki tugas apa-apa. Padahal waktu di awal pembentukan BUMDes sekretaris diajak untuk sama-sama menjadi pengurus dalam pengelolaan usaha tersebut. Hal yang sama dari hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes bahwa sekretaris itu hanya sampai pada pembahasan program yang akan dijalankan, namun ketika program dijalankan sekretaris sudah tidak memiliki peran apa-apa lagi mulai dari mengikuti pembahasan progres usaha, menerima laporan yang masuk sampai ikut nimbrung dengan pengurus lain. Makanya sampai dengan saat ini, sekretaris BUMDes sudah tidak aktif lagi. Semua tugas sekretaris sudah diambil alih oleh ketua BUMDes, sehingganya sekretaris tidak menunjukkan menau dengan soal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Atas temuan itu dapat dimaknai bahwa konflik struktural yang terjadi yakni mengalami kecenderungan terhadap tugas dari masing-masing pengurus yang sudah tidak dilibatkan dalam menjalankan tugas. Hal yang dirasakan oleh sekretaris BUMDes yang hanya dijadikan sebagai sekretaris namun tidak pernah merasakan kinerja dalam pengelolaan usaha yang bergerak pada sektor pertanian masyarakat. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh (Thalia, 2021) BUMDes didirikan untuk menjalankan usaha sesuai dengan potensi desa Lahumbo, tentunya dalam mendirikan BUMDes memiliki struktur pengurus dalam menjalankan sebuah usaha. Struktur berupa ketua, sekretaris dan bendahara yang memiliki tupoksi masing-masing dan mampu saling berkomunikasi dengan baik. \

Struktur menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, maupun penyampaian laporan. (Sudarwinarni & Aktif, 2017) peranan sekretaris adalah : a. Penjaga dan beranda perusahaan yang berarti sekretaris harus menyeleksi setiap tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan serta mengatur jadwal pertemuan tersebut agar tidak bertabrakan dengan jadwal pimpinan yang lain. B. Filter dan pengelola informasi yang berarti segala informasi yang ada harus diolah dan dipilah terlebih dahulu agar setiap informasi yang ada sudah pasti.

## 3. Konflik Massa

Dalam menjalankan usaha, tentunya ini melibatkan seluruh masyarakat agar memiliki kerjasama yang baik antara pengurus dan masyarakat desa. Dengan membangun sebuah usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang mengelola potensi desa yang memberikan kekuatan besar untuk dapat merealisasikan semua program yang akan dibangun. Konflik masa merujuk pada konflik yang terkait dengan perbedaan generasi atau perbedaan nilai dan aspirasi antara kelompok yang berbeda dalam rentang waktu yang berbeda. Konflik masa seringkali terjadi antara generasi muda (misalnya, kaum muda) dan generasi yang lebih tua (misalnya, kaum tua) dalam hal pandangan politik, sosial, budaya, atau ekonomi. Perbedaan dalam pola pikir, gaya hidup, aspirasi, atau tuntutan

perubahan sosial dapat menciptakan konflik antara generasi yang berbeda. (Kamuli, Latare, & Sahi, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian diatas peran BUMDes dalam menjalankan usaha pengelolaan hasil pertanian masyarakat desa lahumbo sebagai berikut, Peran BUMDes masih belum maksimal dalam pengelolaan usaha yang mereka bangun, dikarenakan disaat pemberian manfaat BUMDes kini tidak ada pemberitahuan langsung berapa yang harus dipinjamkan terhadap masyarakat yang menerima manfaat Dana BUMDes, sehingga masyarakat penerima manfaat merasa kebingungan terhadap pemberian manfaat dana BUMDes. Atas hal tersebut maka menuai lah sebuah konflik antara masyarakat dengan pengurus yakni, pemberitahuan tentang peminjaman modal dan waktu pengembalian modal pinjaman.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat penerima manfaat BUMDes yang mana bahwa ada masyarakat yang sudah mengembalikan dan masih ada juga masyarakat yang belum mengembalikan, sehingga mereka berpikir bahwa kemacetan BUMDes itu disebabkan karena modal yang akan diputar tidak ada lagi. Atas temuan diatas Berdasarkan peran pengurus BUMDes terhadap masyarakat desa lahumbo harus memiliki keterbukaan dalam pengelolaan usaha yang dijalankan, agar tidak ada pertentangan dengan masyarakat lain sebagai penerima dana manfaat BUMDes. Jika dilihat dari kerja sama yang mereka bangun dengan masyarakat lain kini tidak memberikan hasil yang efektif. Ada yang meminjam dengan jumlah yang besar dan ada yang lain meminjam dengan jumlah yang kecil, selain itu ada juga masyarakat yang mengembalikan dengan tepat waktu dan ada masyarakat yang lain tidak mengembalikan dengan tepat waktu, sampai ada yang tidak mengembalikan sama sekali. Dengan terjadinya hal seperti ini maka akan menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial, sehingga dapat mengakibatkan konflik.

### **Faktor Konflik Kelembagaan Bumdes Di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta**

#### **1. Faktor Internal**

Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tata kelola merupakan hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan serta kemajuan BUMDes dalam menjalankan usahanya. Namun dilihat dari beberapa BUMDes yang ada, tentu tidak semua usaha yang dibangun bisa terlaksana dengan baik yang terjadi karena perbedaan persepsi maupun saling bergantung dengan tugas. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Menurut Robbins (2015) Dalam (Ayyaash, 2019) keterlibatan menjadi sebuah fokus utama untuk kebanyakan organisasi karena kebanyakan survei mengindikasikan bahwa sedikit pekerja yang memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa dalam pengelolaan usaha yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lahumbo itu mendapatkan hasil yang tidak efektif, karena dilihat Sumber Daya Manusia yang belum mampu mengelola usaha Bumdes. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Sekretaris BUMDes bahwa tidak pernah terlibat dalam pengelolaan usaha yang dibangun serta sudah tidak ada lagi komunikasi antar sesama pengurus, padahal sebelum terpilih sebagai pengurus memiliki komitmen untuk menumbuhkan nilai kerja sama yang baik untuk perkembangan usaha Desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bendahara BUMDes bahwa setelah terbentuknya struktur BUMDes, kami sudah memiliki komitmen dalam bekerja sama agar dapat mengelola usaha BUMDes, namun realita yang terjadi, kami selaku pengurus minim kinerja mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga dengan penyaluran dana BUMDes.

#### **2. Faktor Eksternal**

(Ayyash, 2019) mendefinisikan faktor yang terjadi pada masyarakat yang Timbul karena ciri-ciri individual, antara lain egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Merujuk teori diatas maka konflik massa terjadi karena adanya sikap yang hanya mementingkan diri sendiri atau sikap egois. Hal ini dapat mempengaruhi pemikiran yang tidak baik terhadap orang lain. Dalam konteks penelitian, terdapat hubungan yang signifikan dengan konflik massa dalam kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai dengan teori yang dijelaskan diatas yang memiliki sikap egoistis dalam menjalankan sebuah usaha yang sudah direncanakan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan diri masyarakat lahumbo sangat



minim ketika diadakannya pertemuan oleh pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa, maka ada beberapa hal yang telah disampaikan kini tidak diterapkan dengan baik.

Partisipasi Masyarakat adalah masyarakat yang terlibat langsung untuk mendukung semua yang sudah dibuat dalam sebuah organisasi, dengan adanya partisipasi masyarakat, maka tahapan sampai perencanaan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik. Mubyarto (1997:35), Arimbi (1993:1), Abe (2005:47) dalam (Laily, 2015) mereka sama-sama berkesimpulan bahwa partisipasi merupakan kesediaan seseorang untuk membantu keberhasilan dari setiap program yang sesuai dengan kemampuan setiap orang, dimana didalamnya terdapat komunikasi yang terjalin secara terus menerus antara pemegang kebijakan dan masyarakat, yang akan berdampak pada pembangunan yang terhindar dari manipulasi, memberikan nilai plus pada legitimasi perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan masyarakat.

Faktor rendahnya partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya hanya karena ketidakhadiran masyarakat Desa Lahumbo dalam pembahasan/Sosialisasi akan tetapi pemerintah Desa bersama pengelola BUMDES seharusnya melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang BUMDES sehingga mereka mau terlibat aktif dalam BUMDES. Pengelola BUMDES bersama pemerintah perlu melakukan sosialisasi tidak hanya dengan kondisi formal akan tetapi dapat mendatangi para pelaku usaha hasil pertanian.

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan permasalahan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Konflik Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo diantaranya (1) Konflik Individual mencakup perselisihan antara Ketua dan pengurus Badan Usaha Milik Desa, hanya mementingkan kepentingan sendiri dalam pengelolaan usaha hasil pertanian masyarakat. (2) Konflik Struktural, fokus pada sisi fungsional atau penyalahgunaan wewenang dalam kepemimpinan yang tidak melibatkan pengurus lain seperti sekretaris dalam mengelola administrasi usaha yang telah dijalankan. (3) Konflik Massa mencakup pada pemberian modal yang tidak merata, selain itu hasil pertanian masyarakat yang belum terbayarkan diakibatkan karena kelalaian dari pengurus dalam manajemen keuangan dana usaha BUMDes.

Sedangkan Faktor konflik dalam Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lahumbo meliputi dua faktor diantaranya; (1) Faktor internal, mencakup pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum paham dalam memenej usaha yang dibangun, selain komunikasi yang kurang baik-baik, sehingganya dalam pengelolaan usaha yang kian dibangun tidak terealisasi dengan baik. (2) Faktor Eksternal, dalam faktor ini masyarakat yang kurang memahami pengelolaan usaha ini, karena dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pembahasan sosialisasi program usaha BUMDes yang tidak ikut hadir sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang jelas. Selain beberapa masyarakat yang belum mengembalikan modal usaha dengan memiliki stigma itu adalah dana pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- AYYAASH, K. I. (2019). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK PADA INTERNALBROWNIES HACENDA. *JURNAL MANAJEMEN DAN START-UP BISNIS*, 4, 01-10.
- Fitria, & Rona. (2012). Proses pembelajaran dalam setting inklusi di sekolah dasar. *jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(1), 90-101.
- Kamuli, S., Latare, S., & Sahi, Y. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545-551.
- R, Al-Fath, & Wijaya, H. (2022). Kontribusi Usaha Ternak Ruminansia Sapi Terhadap Penghidupan Keluarga Peternak di Desa Kalimanggis, Temanggung. *URNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 11(1), 14-21.
- Ridlwan. (2014). "Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *urnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440.
- Sugiono. (2013). Analisa Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Industri Ritel yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2012. *Business Accounting Review*.

- Thalia. (2021). PERAN-PERAN SEKRETARIS DALAM MEMBANTU PIMPINAN DI PERUSAHAAN. *Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 4(1).
- Wahyudi, & A. (2015). KONFLIK, KONSEP TEORI DAN PERMASALAHAN ANDRI WAHYUDI. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 8(1), 38-52.
- Zubaidah, & S. (2010). Berpikir Kritis: kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran sains. *16*(1), pp. 1-14.